

**PENGARUH JUMLAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG,  
NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI YOGYAKARTA**

**Elisabeth Tilana Mutiara Putri  
Erly Suandy**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel-variabel independen (jumlah SPPT, NJOP, tunggakan pajak) terhadap variabel dependen (penerimaan PBB) baik secara parsial maupun simultan. Data yang diperoleh berasal dari Dinas Pajak Daeran dan Pengelola Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, meliputi jumlah SPPT, NJOP, tunggakan pajak, dan penerimaan PBB.

Metodologi penelitian dalam penelitian penulis adalah penelitian kausal dengan jumlah data 84. Metode pemilihan sample menggunakan *purposive sampling*, jenis data yang dipakai adalah data arsip sekunder dengan unit data kecamatan selama enam (6) tahun. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat analisis statistik regresi linier berganda.

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa variabel NJOP dan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB, namun jumlah SPPT tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB. (2) Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa jumlah SPPT, NJOP, dan tunggakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

**Kata Kunci: SPPT, NJOP, Tunggakan Pajak, dan Penerimaan PBB**

**PENDAHULUAN**

Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yg mengatur tentang pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 dan BPHTB oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berlaku di seluruh daerah di Indonesia. Potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta cukup besar. Hal ini salah satunya dikarenakan bertambahnya jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang mengindikasikan bertambahnya jumlah objek pajak bumi dan bangunan. Dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pemerintah menetapkan NJOP atas tanah ataupun bangunan dengan cara menetapkan harga rata-rata tanah atas transaksi jual beli yang terjadi di lingkungan masyarakat. Walaupun potensi penerimaan PBB cukup tinggi, pemerintah kota Yogyakarta mengalami kendala yaitu dengan banyaknya tunggakan PBB. Banyaknya tunggakan PBB ini dikhawatirkan dapat membuat realisasi penerimaan PBB tidak dapat mencapai potensi penerimaan PBB yang sesungguhnya.

#### Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah SPPT berpengaruh terhadap penerimaan PBB?
2. Apakah NJOP berpengaruh terhadap penerimaan PBB?
3. Apakah tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB?
4. Apakah jumlah SPPT pajak bumi dan bangunan, NJOP dan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB?

#### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah hasil dari penelitian sebelumnya sama dengan hasil penelitian yang dilakukan pada objek yang berbeda.

### **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Bertambahnya jumlah SPPT yang berisi jumlah pajak terutang akan menambah potensi objek PBB, hal ini diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan PBB. Penelitian sebelumnya yang berkaitan yang dilakukan oleh Sasana (2005) menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

Ha1 : jumlah SPPT berpengaruh terhadap penerimaan PBB

#### Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan PBB adalah NJOP. Semakin besar NJOP, maka semakin besar jumlah PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak. Semakin besar NJOP, maka semakin besar kemungkinan tercapainya target PBB. Penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2005) di Medan menunjukkan bahwa kenaikan NJOP berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan

oleh Imbing (2013) di Manado yang menunjukkan bahwa semakin tinggi NJOP akan berimplikasi terhadap penerimaan PBB. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ha<sub>2</sub> : NJOP berpengaruh terhadap penerimaan PBB

#### Pengaruh Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Kendala pemerintah dalam meningkatkan penerimaan PBB salah satunya dikarenakan wajib pajak yang tidak membayar PBB nya. Semakin banyak tunggakan pajak, maka realisasi penerimaan PBB akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit jumlah tunggakan pajak maka semakin tinggi penerimaan PBB. Penelitian seperti ini pernah dilakukan oleh Septiany (2011) yang menunjukkan bahwa tunggakan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha<sub>3</sub> : Tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB

#### Pengaruh Jumlah SPPT, NJOP, Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan bertambahnya jumlah SPPT dan dinaikkannya NJOP bumi, maka diharapkan penerimaan PBB semakin meningkat. Selain itu, pemerintah mengharapkan jumlah tunggakan pajak semakin berkurang setiap tahunnya agar realisasi penerimaan PBB semakin meningkat. Hipotesis untuk penelitian ini adalah :

Ha<sub>4</sub> : jumlah SPPT, NJOP, dan tunggakan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### Objek, Populasi dan Data Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan Kota Yogyakarta.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah data mengenai jumlah SPPT, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tunggakan pajak, dan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Data diperoleh dari Seksi Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta.

#### Operasionalisasi Variabel dan Pengukurannya

##### 1. Variabel Independen

Variabel independen sering disebut variabel stimulus, prediktor, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah SPPT, Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, dan tunggakan pajak.

## 2. Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan PBB.

## 3. Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Dimensi	Skala
Jumlah SPPT	SPPT adalah surat yang digunakan oleh pemerintah untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak.	Jumlah SPPT dari tahun 2008 sampai tahun 2013.	Rasio
NJOP	NJOP merupakan dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.	NJOP dari sampel penelitian dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013	Rasio
Tunggakan Pajak	Tunggakan pajak merupakan jumlah pajak yang belum/tidak dibayarkan oleh wajib pajak bumi dan bangunan	Jumlah tunggakan PBB tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.	Rasio
Penerimaan PBB	Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan	Jumlah realisasi penerimaan PBB dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.	Rasio

## Model Empiris

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

a = Konstanta

b<sub>1</sub>-b<sub>3</sub> = Koefisien

X<sub>1</sub> = Jumlah SPPT

X<sub>2</sub> = Nilai Jual Objek Pajak

X<sub>3</sub> = Tunggakan pajak

e = Error

## ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data residual dinyatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi *one-sample kolmogorov-smirnov test* lebih besar daripada  $\alpha$  0,05 (Ghozali, 2011).

Tabel 1  
Uji Normalitas

	PenerimaanPBB	Tunggakan	SPPT	NJOP	
N	84	84	84	84	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	45590.5360	18379.4971	3.7433	1378.1345
	Std. Deviation	18440.78688	7609.93668	.22890	390.13310
Most Extreme Differences	Absolute	.109	.112	.142	.108
	Positive	.109	.112	.142	.108
	Negative	-.065	-.063	-.089	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z	.999	1.023	1.305	.986	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.271	.246	.066	.285	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan table 1, diketahui bahwa nilai probabilitas semua variabel lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah menguji apakah dengan model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Suatu model regresi dikatakan bebas multikolinearitas apabila nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10, dan *Tolerance* > 0,1.

Tabel 2  
Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1386.395	5973.487		.232	.817		
Tunggakan	2.419	.051	.998	47.782	.010	.460	2.176
SPPT	190.706	1523.479	.002	.125	.229	.561	1.782
NJOP	.708	.953	.015	.743	.015	.494	2.025



Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1386.395	5973.487		.232	.817		
Tunggakan	2.419	.051	.998	47.782	.010	.460	2.176
SPPT	190.706	1523.479	.002	.125	.229	.561	1.782
NJOP	.708	.953	.015	.743	.015	.494	2.025

a. Dependent Variable: PenerimaanPBB

Dari hasil tabel 2, nilai *Tolerance* dari variabel SPPT sebesar 0,561, variabel NJOP sebesar 0,494, dan variabel tunggakan sebesar 0,460 menunjukkan nilai yang lebih dari 0,10. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel. Selain itu nilai VIF untuk variabel SPPT 1,782, NJOP 2,025, dan tunggakan 2,176 tidak lebih dari 10. Jadi tidak ada gejala multikolinieritas dalam regresi.

#### Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan yang satu dengan yang lain. Uji heteroskedastisitas yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji *Glejser*. Menurut uji *Glejser*, suatu model regresi dikatakan bebas heteroskedastisitas apabila tiap variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan (probabilitas  $(p) > 0,05$ ) terhadap nilai absolut residual variabel dependen.

Tabel 3  
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2070.608	11691.312		.177	.860
SPPT	-705.014	920.409	-.127	-.766	.446
NJOP	-770.593	933.341	-.148	-.826	.411
Tunggakan	2195.707	1544.145	.274	1.422	.159

a. Dependent Variable: ABSres\_1

Hasil pada table 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari jumlah SPPT, tunggakan pajak, dan NJOP lebih besar dari nilai alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi adalah menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pada periode t-1 (Gozhali, 2011). Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi, yang artinya tidak ada korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu saling berkorelasi. Pengujian terhadap fenomena ini dapat menggunakan *Durbin-Watson Test*.

Tabel 4  
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.412 <sup>a</sup>	.170	.138	1414.30404	1.877

a. Predictors: (Constant), NJOP, SPPT, Tunggakan

b. Dependent Variable: PenerimaanPBB

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,877 terletak di antara batas bawah (du) 1,6942 dan batas atas 2,358 (4-1,6942). Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi.

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah uji Regresi Linear Berganda karena dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Rumus regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = 1386,395 + 190,706 X_1 + 0,708 X_2 + 2,419X_3 + e$$

Keterangan

Y = Variabel Dependen (Penerimaan PBB)

a = Konstanta

b = Koefisien

X<sub>1</sub> = Variabel Independen (jumlah SPPT)

X<sub>2</sub> = Variabel Independen (NJOP)

X<sub>3</sub> = Variabel Independen (tunggalan PBB)

e = Residual atau *Prediction Error*

#### 1. Pengujian parsial

Tujuan dari pengujian adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima, yang berarti bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen, yakni jumlah SPPT 0,229, NJOP 0,015, dan tunggakan pajak 0,010. Berdasarkan hasil tersebut, variabel independen tunggakan pajak dan NJOP yang dimasukkan dalam model regresi adalah signifikan karena tidak melebihi alpha 0,05. Sedangkan variabel independen jumlah SPPT tidak signifikan karena melebihi alpha 0,05.

Tabel 5  
Pengujian Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1386.395	5973.487		.232	.817
Tunggakan	2.419	.051	.998	47.782	.010
SPPT	190.706	1523.479	.002	.125	.229
NJOP	.708	.953	.015	.743	.015

a. Dependent Variable: PenerimaanPBB

## 2. Pengujian Simultan

Tujuan dilakukannya uji simultan adalah untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam persamaan regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima, yang berarti bahwa semua variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 6  
Pengujian Simultan

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.777E10	3	9.257E9	1634.603	.000 <sup>a</sup>
	Residual	4.531E8	80	5663378.760		
	Total	2.823E10	83			

a. Predictors: (Constant), NJOP, SPPT, Tunggakan

b. Dependent Variable: PenerimaanPBB



Hasil yang diperoleh pada tabel 6 memperlihatkan bahwa nilai signifikansi 0,000, lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Hal ini berarti semua variabel independen (jumlah SPPT, NJOP, dan tunggakan pajak) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Penerimaan PBB).

### 3. Uji Koefisien Determine

Uji koefisien *determine* akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bias dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variasi variabel yang lain (Santoso dan Ashari, 2005). Nilai koefisien ini adalah antara 0 dan 1, apabila hasilnya mendekati 0 maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas sedangkan apabila mendekati 1 maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen mampu memberikan banyak informasi guna memprediksi variasi variabel independen.

Tabel 7  
Koefisien Determine

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.412 <sup>a</sup>	.170	.138	1414.30404	1.877

a. Predictors: (Constant), NJOP, SPPT, Tunggakan

b. Dependent Variable: PenerimaanPBB

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,138 menunjukkan bahwa 13,8% variabel dependen (penerimaan PBB) dapat dijelaskan oleh variabel independen (SPPT, NJOP, dan tunggakan pajak). Sedangkan sisanya sebesar 86,2% (100%-13,8%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

### Pembahasan

Hasil pengujian parsial untuk variabel jumlah SPPT pada tabel sebelumnya menunjukkan nilai signifikansi 0,229, lebih besar daripada alpha 0,05 dan koefisiensi bertanda positif. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka  $H_{a1}$  ditolak. Dengan kata lain, variabel jumlah SPPT tidak berpengaruh terhadap variabel penerimaan PBB. Dapat dikatakan juga, bertambahnya jumlah SPPT tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan PBB. Tidak semua wajib pajak yang menerima SPPT memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil pengujian parsial untuk variabel NJOP pada tabel sebelumnya menunjukkan nilai signifikansi 0,015, lebih kecil daripada alpha 0,05. Hasil pengujian di atas, menunjukkan bahwa  $H_{a2}$  diterima. Dengan kata lain, variabel NJOP berpengaruh terhadap variabel penerimaan PBB. Dengan kata lain, meningkatnya NJOP yang ditetapkan pemerintah Kota Yogyakarta mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB.

Hasil pengujian parsial untuk variabel tunggakan pajak pada tabel sebelumnya menunjukkan nilai signifikansi 0,010, lebih kecil daripada alpha 0,05 dan koefisiensi bertanda positif. Berdasarkan hasil tersebut, maka  $H_{a3}$  diterima.

Dengan kata lain, variabel tunggakan pajak berpengaruh terhadap variabel penerimaan PBB. Dengan kata lain, adanya tunggakan pajak mempengaruhi realisasi penerimaan PBB.

Hasil uji simultan menunjukkan nilai signifikansi 0,000, lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Dengan kata lain, secara simultan, variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah SPPT, NJOP dan tunggakan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PBB.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil pengujian parsial untuk variabel jumlah SPPT menunjukkan bahwa variabel jumlah SPPT tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB sehingga  $H_{a1}$  ditolak.
2. Hasil pengujian parsial untuk variabel NJOP menunjukkan bahwa variabel NJOP berpengaruh terhadap penerimaan PBB sehingga  $H_{a2}$  diterima.
3. Hasil pengujian parsial untuk variabel tunggakan pajak menunjukkan bahwa variabel tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB sehingga  $H_{a3}$  diterima.
4. Dari pengujian secara simultan diperoleh bahwa jumlah SPPT, NJOP, dan tunggakan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{a4}$  diterima.

### Saran

Peneliti memberikan saran kepada penelitian selanjutnya untuk menambahkan rentang waktu data penelitian dan juga beberapa variabel independen. Hasil uji statistik akan menjadi tidak bias apabila jumlah data observasi yang digunakan semakin banyak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Damanik. 2009. *Pengaruh Kenaikan NJOP terhadap Penerimaan PBB pada KP PBB Medan Belawan*. Skripsi. Program S-1 Ekstensi Universitas Sumatera Utara. Medan
- Imbing, Ovelia. 2013. *Analisis Penetapan NJOP dan Implikasinya terhadap Penerimaan PBB di Kota Manado*. Jurnal EMBA vol 1/no 3/Juni 2013
- Jogiyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sasana, Hadi. 2005. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas*. Semarang: Dinamika Pembangunan vol 2/no 1/Juli 2005

Septiany, Citra Wulan. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Sleman, Yogyakarta)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat

Sumitro, Rochmat. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT. Eresco

Uma Sekaran, 2006, *Research Methods For Business*, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wahyudi, Edi. 2012. Memahami Pengelolaan PBB P2 dan Menyiapkan Peraturan Pendukungnya. <http://eddiwahyudi.com/2012/07/19/memahamipengelola-an-pbb-p2-dan-menyiapkan-peraturan-pendukungnya/>. Diunduh 26 Juni 2013.